

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 *Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007*. (2008). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2006). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 *Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional*. (2007). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 *Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017*. (2016). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *Tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah*. (2013). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2007). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara*. (2011). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. (2010). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan*. (2005). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2005). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*. (2004). Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. (2004). Jakarta.

- Ariani, R.K & Putri, A.G. (2016). 'Pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah'. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. ISSN 2460-0784. hlm 364-369.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2013-2015*. Jakarta.
- Bawono, I. R. & Novelsyah, M. (2012). *Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pada SKPD dan SKPKD*. Jakarta: Salemba empat.
- Ernawati & Riharjo. (2017). 'Pengaruh kinerja pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah'. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi. Vol 6 Nomor 2*.
- Erstelita & Darwis, R.T. (2015). 'Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat'. Universitas Negeri Padang. hlm 1 – 23.
- Darsono, I., L. (2013). 'Pengaruh Alokasi Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Profita*. Hlm: 11 - 21.
- Dwirandra, A.A.N.B. (2008). 'Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali tahun 2002 – 2006'. *Jurna Ilmiah*. Universitas Udayana. Hlm 01 - 21.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, N. (2014). *Corporate social responsibility*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, A. (2016). *Manajemen keuangan sektor publik*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Kusufi, M.S. (2012). *Akutansi keuangan daerah*. Edisi 4, Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2013). *Teori akuntansi*. Edisi Revisi 2011. Jakarta: Rajawali Pers.
- Imawan & Wahyudin. (2014). 'Analisis kemandirian keuangan daerah provinsi jawa tengah tahun anggaran 2010-2012'. *Accounting analysis journal*
- Lako, A. (2011). *Dekonstruksi CSR & reformasi paradigma binsis & akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Mahsun, M. (2014). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Naganathan, M & Sivagnanam, J.K. (2000). 'Federal transfer and the tax effort of the states in India'. *Indian Economic Journal*. Vol. 47, No. 04. University of Madras.hlm 252-281.
- Nordiawan. (2007). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba empat.
- Oktavianti, R. (2016). 'Pengaruh rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di provinsi DIY'. *Jurnal Kajian Bisnis*. Vol. 24, No. 1, 2016, 25 – 34.
- Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. (2016). *Pedoman penulisan tugas akhir skripsi tahun 2016*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.hlm 2-48.
- Raharjo, E. (2007). 'Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi'. *Jurnal Fokus Ekonomi*.Vol. 2, No. 1.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi sektor publik organisasi non laba*. Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sitanggang. (2014). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2011). *Analisis regresi dan uji hipotesis*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: CAPS
- Susanti, D. B. (2016). 'Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (studi pada kota/kabupaten di provinsi jawa barat tahun 2010-2014)'. *Jurnal E-Proceeding of Management*. ISSN : 2355-9357. Vol.3, No.3.
- Wong, D.J. (2004). 'The fiscal impact of economic growth and development on local government capacity'. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Vol.16, No. 03. hlm 413-42.